



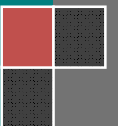
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN ANGGARAN

2011

*TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN ,
EVALUASI, ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN
SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN / MASALAH DAN PEMECAHAN
MASALAH.*

SATUAN KERJA :
PENGADILAN NEGERI JEMBER (098200)
JL. KALIMANTAN NO.: 3, Telp. (0331) 337471 – 335845
FAKSIMIL : 0332 - 335845
e mail : pn.jember@yahoo.co.id
<http://pn-jember.net>



KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Jember yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : 11 tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Pengadilan Negeri Jember.

Dalam tahun anggaran 2011 Pengadilan Negeri Jember mendapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.01 dengan 2 (dua) Program yaitu :
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam DIPA 03 menerima 1 (satu) program yaitu :

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.03 dengan 1 (satu) Program yaitu:Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Sedang dalam tahun anggaran 2012 mendapatkan 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan 2 (dua) Kode Satuan Kerja yaitu :

1. Kode Satuan Kerja 098200, dengan 2 (dua) program yaitu :
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
2. Dan dalam DIPA 03 tetap menerima 1 (satu) Program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 Pengadilan Negeri Jember disusun sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Mahkamah Agung RI.

Jember, 4 Februari 2012

PENGADILAN NEGERI JEMBER
Panitera / Sekretaris

H. SUHARIS, SH.MM.

NIP. 19641122 198503 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jember Tahun 2011 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jember selama tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Inpres No. 5 Tahun 2004 mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, maka LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2011 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jember, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan sesuai Misi-nya yaitu Menjaga Kemandirian badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi	8
C. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2010 – 2014	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	10
B. Rencana Kinerja Tahunan 2011	13
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)	15
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	16
BAB IV PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran- saran	19
BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN	20
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2012	
4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014	
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Jember membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Jember merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Jember sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Jember adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri) :

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim :

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris :

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, juru sita ,juru sita Pengganti serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Jember.
- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jember.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
- Wakil Sekretaris ,membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan LAKIP tahun 2011 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

BAB V : LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 – 2014

1. Visi dan Misi

Sesuai Visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah untuk mewujudkan badan Peradilan yang agung. Dalam Visi ini tergambar arah pencapaian peradilan Indonesia yang modern, bertanggung jawab dan Kredibel.

Sedangkan Misi yang ditetapkan adalah menjaga kemandirian badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi Lembaga Peradilan.

1. Tujuan dan sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jember adalah :

- Mewujudkan profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa
- Meningkatkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara
- Meningkatkan kualitas putusan Hakim
- Meningkatkan pelayanan administrasi kepaniteraan

- Meningkatkan pelayanan administrasi kesekretariatan
- Meningkatkan pengawasan
- Meningkatkan disiplin kerja
- Memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat
- Memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat

b. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai ,yaitu :

- a. Tersedianya dukungan Manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan- badan Peradilan dibawahnya
- c. Terlaksanakannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum..

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dari Program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Jember Tahun Anggaran 2011 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jember yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.01

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk :

- a. Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan
- b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang meliputi sub kegiatan :
 - Pengadaan Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh PNS.
 - Pengadaan Obat-obatan Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
 - Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi
 - Perawatan Gedung Kantor
 - Perawatan Rumah Negara
 - Perawatan Kendaraan Roda 4
 - Perawatan Kendaraan Roda 2
 - Perawatan Sarana Gedung
 - Langganan Daya dan Jasa
 - Jasa Pos/Giro/Sertifikat
 - Operasional Perkantoran dan Pimpinan
 - Pembinaan dan Konsultasi Pengawasan (Perjalanan Dinas)
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
 - Pengadaan kendaraan roda 4
 - Pengadaan Alat pengolah data
 - Pengadaan AC
 - Pengadaan jaringan IT

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, meliputi :
- Operasional persidangan Peradilan
- Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011

**C.PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2011**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan :

- ⊕ menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts;
- ⊕ menentukan satuan setiap kelompok indikator;
- ⊕ menetapkan rencana tingkat capaian (target);
- ⊕ mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan ;
- ⊕ menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya;

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.01 dengan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 117,77 %, output 111,10 %, dan outcome 111,10 %. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 57,84 %, output 83,62 % dan outcome 83,62 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Prog

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 64,49 %, output 99,26 % dan outcome 99,26 %.

Sedangkan untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100,00 %, output 92,62 %, dan outcome 92,62 % dan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 105,00 %, output 27,44 %, dan outcome 27,44 %.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis akuntabilitas dilakukan dengan melakukan Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi ;

- ⊕ Menetapkan indikator sasaran;
- ⊕ Menetapkan rencana tingkat capaian (target);
- ⊕ Mengetahui realisasi indikator sasaran menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Jember menetapkan 3 (Tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 99,95 %.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- b. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 107,47 %.
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 99,26 %.
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 38,40 %.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya dengan senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan meningkatkan profesionalisme kerja, maka dengan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Jember dapat meningkat.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jember Tahun 2011 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jember tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai.
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja pegawai

b. Hambatan / masalah

Beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan, sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya.

B. Saran- saran

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi, maka yang harus dilakukan dengan cara :

1. Melaksanakan program kegiatan sesuai ketersediaan anggaran dengan cermat dan teliti
2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang, sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.

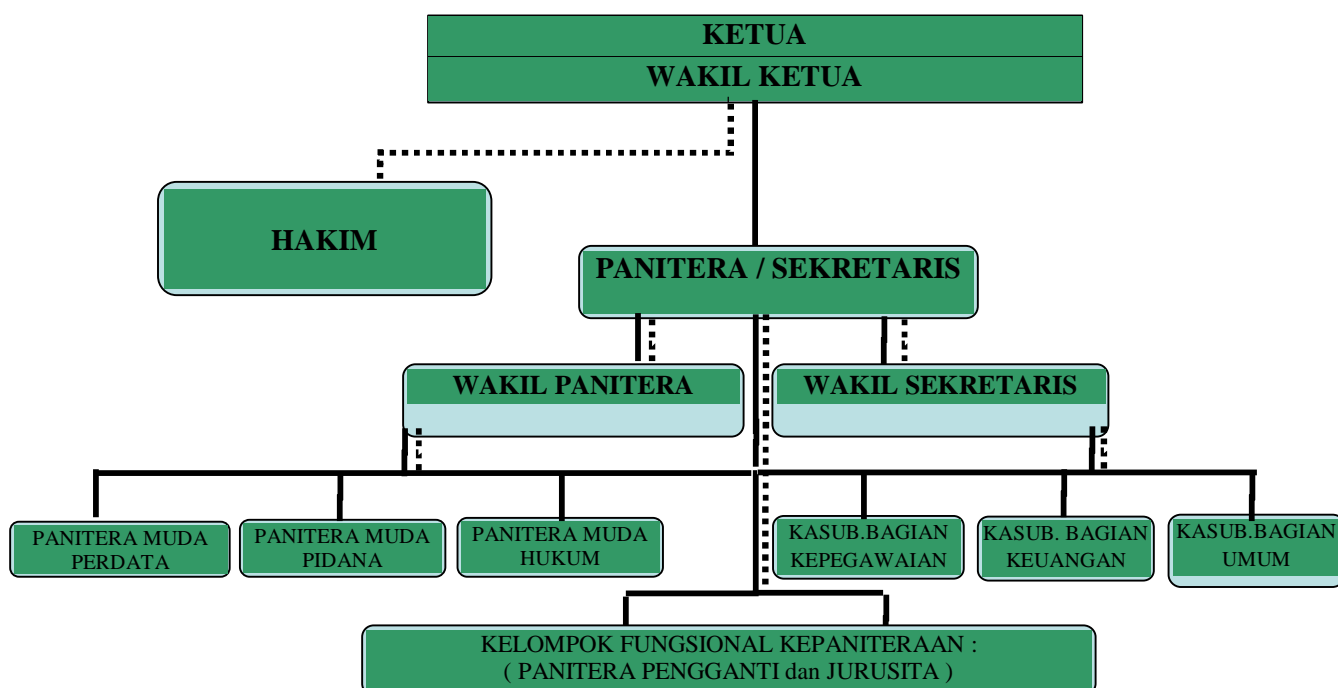
Jember, 04 Februari 2012
PENGADILAN NEGERI JEMBER
Panitera / Sekretaris

H. SUHARIS, SH.MM.
NIP. 19641122 198503 1 005

BAB V

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai



Keterangan :

Garis Koordinasi :

Garis Tanggung Jawab : _____

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Jember Seluruhnya berjumlah **64 (Enam Puluh empat)** Orang termasuk tenaga honorer terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer	=	6	Orang
Golongan I	=	-	Orang
Golongan II	=	2	Orang
Golongan III	=	50	Orang
Golongan IV	=	6	Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis :

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim	=	10	Orang
Panitera / Sekretaris	=	1	Orang
Wakil Panitera	=	1	Orang
Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
Panitera Muda Hukum	=	1	Orang
Panitera Pengganti	=	18	Orang
Jurusita	=	2	Orang

Jurusita pengganti	=	13	Orang
Staf	=	4	Orang
Calon PNS / Calon Hakim	=	2	Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural :

Wakil Sekretaris	=	1	Orang
Kasubag Umum	=	1	Orang
Kasubag Kepegawaian	=	1	Orang
Kasubag Keuangan	=	1	Orang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja utama yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun indikator kinerja Utama Pengadilan Negeri Jember adalah :

1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah (SAP), tanggapan atas temuan Pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan Pemeriksa, Melakukan Bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan.
2. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk Perbendaharaan, penilaian, supervisi ke satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.
2. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum Peradilan Tingkat Banding dan tingkat daerah
3. Tersedianya infrastruktur Teknologi
4. Peningkatan jumlah Penyelesaian perkara .
5. Peningkatan Penyelesaian proses administrasi perkara
6. Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

RENCANA KINERJA TAHUN 2012



MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014
